



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2016 - 2017**

JUM'AT, 28 APRIL 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2017**



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2016-2017**

JUMAT, 28 APRIL 2017

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2017**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2016-2017**

JUMAT, 28 APRIL 2017

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga hari ini dapat bersama-sama hadir dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017. Masa Persidangan IV ini telah berlangsung sejak tanggal 15 Maret sampai dengan 28 April 2017.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Mengawali Pidato ini, DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada Putaran ke II di Provinsi DKI Jakarta yang berjalan aman, lancar dan damai, serta tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 78 persen. DPR RI juga mengapresiasi kerja keras KPU sebagai penyelenggara Pilkada serta aparat keamanan yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilihan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, Pimpinan akan menyampaikan kegiatan DPR RI yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan IV, di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta diplomasi parlemen.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Masa Sidang IV DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan 3 (tiga) RUU, yaitu:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif, 2014.

Dengan disahkannya RUU ini, DPR berharap agar permasalahan yang terkait penetapan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia-Filipina dapat menciptakan kepastian hukum terhadap kedaulatan wilayah, ruang, dan pemanfaatan ekonomi melalui sumber daya alam di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia.

2. RUU tentang Sistem Perbukuan

Buku merupakan salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan

disahkannya RUU tentang Sistem Perbukuan diharapkan keterbatasan akses masyarakat terhadap buku yang bermutu, murah dan merata, baik buku pendidikan maupun buku umum yang selama ini menjadi kendala dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat teratasi. Selain itu, Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan yang komprehensif juga melindungi seluruh pelaku perbukuan.

3. RUU tentang Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan nasional adalah salah satu investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa pemajuan kebudayaan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan keberagaman kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa dapat lebih berperan dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan peradaban dunia.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I dan Komisi X yang telah menyelesaikan pembahasan RUU di atas. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Fraksi serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR atas kerjasamanya. Tahapan selanjutnya menjadi kewajiban bagi Anggota untuk mensosialisasikan beberapa Undang-Undang yang telah disahkan di atas melalui kunjungan kerja pada masa reses.

Dalam Rapat Paripurna DPR juga telah menyetujui RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Selain itu, DPR juga menerima 1 (satu) RUU yang diajukan oleh Pemerintah, yaitu RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kedua RUU tersebut akan segera dibahas bersama Pemerintah pada masa sidang yang akan datang.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 dari BPK.

Pimpinan DPR RI berharap hasil pemeriksaan BPK tersebut menjadi masukan yang sangat berharga bagi Dewan, khususnya komisi-komisi DPR untuk mempelajari, membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja masing-masing.

Apabila Komisi-komisi memerlukan tambahan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan tersebut, maka sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna yang lalu Komisi dapat mengundang BPK untuk melakukan rapat konsultasi.

Badan Urusan Rumah Tangga juga telah menyampaikan usulan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2018 yang akan dibahas bersama Pemerintah dalam Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2018.

Terkait dengan Kebijakan *Tax Amnesty* yang telah berakhir pada 31 Maret 2017, DPR tetap mengapresiasi Pemerintah, walaupun kebijakan tersebut tidak mencapai target. Dengan berakhirnya kebijakan ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan semakin meningkat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap :

1. 2 (dua) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu;
3. Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI;
4. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Migas;
5. Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat;
6. Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
7. Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI.

Kita harapkan semoga para pejabat publik yang terpilih dapat mengemban tugas dengan penuh amanah dan memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa dan negara.

DPR juga mengapresiasi dan mendukung Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria yang sedang dijalankan Pemerintah. DPR berharap dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta dilandasi payung hukum yang kuat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru atau terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Untuk mensukseskan program tersebut DPR mendorong Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat dipahami dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Program tersebut, DPR sepakat untuk membentuk Tim Pengawas DPR tentang Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria yang dipimpin oleh Pimpinan DPR bersama Fraksi-Fraksi agar program tersebut dapat diimplementasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam peran diplomasi parlemen, DPR RI telah menghadiri sejumlah sidang dan konferensi organisasi parlemen regional dan internasional, yaitu:

1. Pertemuan Komisi Tetap Asosiasi Parlemen Asia (APA) tentang Masalah-Masalah Politik dan Komisi Khusus Pembentukan Parlemen Asia tanggal 13 - 17 Maret 2017 di Islamabad - Pakistan;
2. Pertemuan ke-136 Sidang Persatuan Parlemen Internasional (IPU) tanggal 1 - 5 April 2017 di Dhaka-Bangladesh; dan

3. Sidang Forum Global Perempuan dalam Parlemen dalam G20 bertema digitalisasi, pada tanggal 5 - 6 April 2017 di Dusseldorf, Republik Federal Jerman.

Kegiatan Diplomasi Parlemen lainnya DPR telah mengadakan *ceremony* Peringatan "*International Women's Day*" pada tanggal 20 Maret 2017 di Ruang Pustakaloka DPR RI yang bekerjasama dengan beberapa perwakilan negara sahabat.

Selain itu, DPR RI juga telah menerima tamu kehormatan beberapa Ketua Parlemen negara sahabat, yaitu:

1. Ketua Parlemen Thailand Yang Mulia Pornpetch Wichitcholchai pada tanggal 15 Maret 2017; dan
2. Ketua Parlemen Bahrain Yang Mulia H.E. Mr. Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla pada tanggal 30 Maret 2017.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk bagi kita semua dan melaksanakan tugas dan fungsi konstitusional.

Akhirnya, saya atas nama Pimpinan DPR RI, mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 29 April sampai dengan 17 Mei 2017 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017. Rentang waktu ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakilnya.

Masa Persidangan berikutnya akan dimulai pada tanggal 18 Mei 2017. Selamat bekerja, semoga DPR RI dapat terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusionalnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd.

Drs. SETYA NOVANTO, Ak., M.M.